



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KE IPDN JATINANGOR
PROVINSI JAWA BARAT TERKAIT EVALUASI PENERIMAAN PRAJA IPDN**

MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-2024

TANGGAL 21 SEPTEMBER 2023

I. PENDAHULUAN

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) merupakan lembaga pendidikan kedinasan bertujuan untuk mencetak atau menghasilkan aparat atau pamong praja yang berkualitas, unggul, berkompetensi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu pamong praja lulusan IPDN diharapkan mampu mendayagunakan modal intelektual, meningkatkan kinerja menghadapi tantangan dan peluang perkembangan global untuk mewujudkan *good governance*. Sehingga kementerian/lembaga yang menjadi penyelenggara harus mampu menjalankan peran sebagai fasilitator sekaligus regulator. Pemerintah harus membuat aturan dan standar yang jelas, penyediaan layanan yang efisien, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. IPDN memiliki tanggungjawab untuk mampu mencetak kader-kader pemerintahan yang memiliki persyaratan dan jiwa kepemimpinan, terutama ahli dalam tata kelola administrasi pemerintahan.

Setiap tahun IPDN membuka formasi sebanyak 1.210 orang, namun pada tahun ini hanya membuka formasi sebanyak 534 orang. Dasar kebijakan pengurangan kuota tersebut adalah rencana para lulusan perguruan tinggi yang telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan diberikan bekal ilmu pemerintahan. Harapannya, CPNS yang sebelumnya berlatar pendidikan umum saat memasuki ke pemerintahan akan terbekali dengan ilmu pemerintahan. Dibandingkan dengan sekolah kedinasan lainnya, penerimaan calon mahasiswa sekolah kedinasan tidak berubah. STAN membuka penerimaan sebanyak 1.100 orang dan sekolah perhubungan sebanyak 1.408 orang. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan apabila IPDN melakukan pengurangan kuota penerimaan calon mahasiswa.

Permasalahan pengurangan kuota penerimaan IPDN nantinya akan berdampak pada pengisian jabatan-jabatanpelaksana kepamongprajaan di Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pengurangan kuota penerimaan IPDN juga berdampak pada anggaran yang dialokasikan yang selama ini berjalan. Sebaliknya, anggaran seharusnya tidak dialokasikan kepada Pendidikan Pemerintahan terkait adanya persiapan atau transisi CPNS umum yang berlatar pendidikan non Pemerintahan. Sehingga seharusnya alokasi Pendidikan Pmerintahan kepada CPNS umum tidak mengganggu kuota

penerimaan IPDN dan pemerintah dapat mencari anggaran lain untuk hal tersebut sehingga semuanya dapat tercapai secara beriringan.

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) telah melaksanakan program Seleksi Penerimaan dan Seleksi Calon Praja Tahun 2023. Adapun hasil seleksi penerimaan dan seleksi calon praja 2023 ditentukan oleh prosedur dan mekanisme seorang peserta calon Praja dapat diterima dan lulus menjadi praja IPDN. Sehingga penting melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ataupun hasil dari seleksi penerimaan dan seleksi calon praja IPDN tahun 2023 terkait perencanaan anggaran, realisasi program, kurikulum, transparansi rekrutmen dan seleksi Praja IPDN, pengurangan kuota penerimaan Praja IPDN oleh BKN, serta kendala-kendala lainnya. Komisi II DPR RI sangat peduli dan mendukung berbagai upaya yang dilakukan IPDN untuk tetap menjalankan perencanaan kuota penerimaan Praja IPDN.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kunjungan Kerja Spesifik ke IPDN Jatinangor Provinsi Jawa Barat terkait evaluasi penerimaan Praja IPDN masa persidangan I Tahun Sidang 2023-2024, Tanggal 21 September 2023 merupakan pelaksanaan tugas DPR di bidang pengawasan berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) huruf f Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib. Melalui kunjungan kerja spesifik ke IPDN Jatinangor, Komisi II DPR RI ingin mendapatkan penjelasan tentang berbagai hal terkait dengan penerimaan Praja IPDN. Komisi II DPR RI akan menampung berbagai permasalahan yang dihadapi IPDN, sekaligus masukan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti pada rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri.

III. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI

NO	NO-A	NAMA	KETERANGAN
1.	A-270	Dr. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.	Ketua Tim/ Ketua Komisi II/F-P. Golkar
2.	A-142	Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A, M.H., M.IP	Wakil Ketua Komisi II/F-PDIP
3.	A-152	Ir. H. Endro Suswanto Yahman, M.Sc.	Anggota/F-PDIP
4.	A-240	Drs. Cornelis, M.H.	Anggota/F-PDIP
5.	A-248	Hj. Aidah Muslimah, S.E.	Anggota/F-PDIP
6.	A-310	Agung Widyanoro, S.H., M.Si.	Anggota/F-P.Golkar
7.	A-105	Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.	Anggota/F-P.Gerindra
8.	A-528	Rezka Oktoberia	Anggota/F-P.Demokrat
9.	A-534	H. Zulkiifli Anwar	Anggota/F-P.Demokrat
10.	A-422	Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.	Anggota/F-PKS
11.	A-428	Teddy Setiadi, S.I.Kom.	Anggota/F-PKS
12.	A-503	Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin	Anggota/F-PAN

IV. HASIL KUNJUNGAN

▪ Realisasi program dan anggaran Tahun 2023, Anggaran Tambahan Tahun 2023, dan Penyerapannya

Alokasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan DIPA Petikan Setjen Kemendagri Nomor SP-DIPA-010.01.1.448302/2023 untuk tahun 2023 IPDN mendapat alokasi anggaran sebesar Rp592.763.528.000,00. Sampai dengan Bulan Juli 2023 telah mengalami 2 kali perubahan alokasi anggaran sebagai berikut:

- a. Adanya penambahan pagu anggaran dari hibah Gubernur Kalimantan Barat sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 707/RO-KESRA/2023 Tanggal 9 Mei 2023 Tentang Pemberian Bantuan Hibah Berupa Uang untuk Pembangunan Sarana Dan Prasarana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Kalimantan Barat sebesar Rp6.000.000.000,00 digunakan untuk:
 1. Pembuatan Pagar Pembatas sebesar Rp.1.798.461.000,00;
 2. Pembangunan Masjid sebesar Rp.3.190.296.000,00;
 3. Pembangunan Saluran Drainase Luar sebesar Rp798.038.000,00; dan
 4. Pembuatan Drainase Dalam Kawasan Kampus sebesar Rp213.205.000,00
- b. Pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan anggaran lingkup Kemendagri Tahun 2023 sebesar Rp.2.488.691.000,00 tanggal 3 Juli 2023 yang digunakan untuk program kegiatan Prioritas Lingkup Kemendagri, pada komponen:
 1. Ditjen Keuangan Daerah sebesar Rp.2.322.457.000,00; dan
 2. Ditjen Otonomi Daerah sebesar Rp.166.234.000,00.

Sehingga alokasi anggaran IPDN setelah bulan Juli 2023 menjadi sebesar Rp.596.274.837.000,00 bersumber dari Rupiah Murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pagu dan Sumber Anggaran

No.	Sumber Anggaran	Besar Anggaran (Rp)
1.	Rupiah Murni	585.609.490.000
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	10.665.873.000
Total		596.274.837.000

a. Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Dari anggaran sebesar Rp596.274.837.000,00 didistribusikan berdasarkan jenis belanja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2
Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Besar Anggaran (Rp)
1.	Belanja Pegawai	216.796.067.000

2.	Belanja Barang	359.696.443.000
3.	Belanja Modal	19.782.327.000
Total		596.274.837.000

- b. Realisasi anggaran IPDN Tahun 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 sebesar Rp428.556.932.030,00 atau 71,87% dari Pagu sebesar Rp596.274.837.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.3
Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
1.	Belanja Pegawai	216.796.067.000	152.648.961.120	70,41	64.147.105.880
2.	Belanja Barang	359.696.443.000	272.723.566.600	75,82	86.972.876.400
3.	Belanja Modal	19.782.327.000	3.184.404.310	16,10	16.597.922.690
Total		596.274.837.000	428.556.932.030	71,87	167.717.904.970

- a. Rincian untuk alokasi dan realisasi anggaran per Kampus IPDN sampai dengan tanggal 20 September 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.4
Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Kampus

No	IPDN Kampus	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (20 Sept 2023) (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
1.	Jatinangor	358.634.021.000	262.952.004.124	73,32	95.682.016.876
2.	Jakarta	53.066.283.00	37.328.221.906	70,34	15.738.061.094
3.	Sumbar	29.630.541.000	18.343.660.913	61,91	11.286.880.087
4.	Kalbar	33.269.394.000	21.124.932.095	63,50	12.144.461.905
5.	Sulsel	32.127.958.000	23.039.547.482	71,71	9.088.410.518
6.	Sulut	27.288.845.000	19.349.884.903	70,91	7.938.960.097
7.	NTB	30.601.739.000	21.415.511.158	69,98	9.186.227.842
8.	Papua	31.656.056.000	25.003.169.449	78,98	6.652.886.551
Total		596.274.837.000	428.556.932.030	71,87	167.717.904.970

c. Capaian Strategis IPDN Tahun 2023

1. Bidang Pendidikan

- a. Terselenggaranya pelaksanaan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi IPDN sebagai Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang terakreditasi unggul serta mengedepankan kualitas Pendidikan Tinggi (JARLATSUH), Kajian dan Penelitian serta Pengabdian Masyarakat yang ditopang oleh sinergi dan kolaborasi Core dan Supporting System.

Terselenggaranya Seminar Nasional dan Stadium General bagi Praja dan Civitas Akademika IPDN, dengan Narasumber dari Pejabat Negara (Ketua KPU RI, Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat Bawaslu RI, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri); Kepala Daerah (Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Gubernur Provinsi Maluku, Walikota Bukittinggi); dan Tokoh Nasional (Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, dan Ketua Dewan Pengarah Perludem).

- b. Terselenggaranya Ujian Komprehensif bagi Satuan Praja Utama Angkatan XXX sejumlah 1.627 Praja
- c. Terselenggaranya Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) IPDN Tahun 2023 sejumlah 27.567 orang dinyatakan lulus seleksi Administrasi, dan sejumlah 26.337 orang yang telah membayar PNBPN serta berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang akan dilaksanakan tanggal 7 s.d 19 Juni 2023.
- d. Terselenggaranya Tes Official IELTS sejumlah 90 Praja di Individual Development Plan (IDP) Bandung dalam rangka Persiapan Beasiswa LPDP, dengan hasil 57 Praja memenuhi persyaratan IELTS dan 33 Praja belum memenuhi persyaratan IELTS dengan masih diberikan kesempatan ujian TOEFLITP.

2. Bidang Pengabdian Masyarakat

- a. Pelaksanaan Kegiatan Magang I, II dan Praktek Lapangan III bagi Satuan Praja dalam rangka Pengabdian kepada Masyarakat yang akan dilaksanakan tanggal 9 Juni s.d 3 Juli 2023.
- b. Keikutsertaan Praja Utama IPDN sebanyak 100 Praja dalam kegiatan LATIHAN INTEGRASI TARUNA WREDA (LATSITARDA) Nusantara ke-XLIII di Provinsi Sumatera Barat bersama Taruna Akademi Militer (AKMIL), Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL), Taruna Akademi Angkatan Udara (AAU), Taruna Akademi Kepolisian (AKPOL), Taruna Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Mahasiswa dari Perguruan Tinggi lainnya.
- c. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Desa Binaan di 12 Desase-Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

3. Bidang Penelitian

Tersusunnya Tema Penelitian dan Kajian Lingkup IPDN Tahun 2023 sesuai dengan Surat Edaran Rektor Nomor 100.4.4/3/IPDN tentang Kegiatan Penelitian dan Kajian Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tema Penelitian:
 - a. Penataan Kelembagaan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua Selatan dan Papua Barat Daya;
 - b. Dampak Pembangunan IKN Bagi Daerah Penyangga dari Segi Sosial, Ekonomi, dan Budaya di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan;
 - c. Konsep Otonomi Daerah Provinsi DKI Jakarta Pasca Pemindahan Ibu Kota Negara di Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan DKI Jakarta; dan
 - e. Pengembangan Ilmu Pemerintahan Pada Tataran Aksiologis di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.
2. Kajian Strategis yang berlokasi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri:
 - a. Kajian Kebutuhan Praja 5 tahun ke depan (2024 s.d 2028);
 - b. Kajian Peningkatan Kualitas Pengelolaan Jurnal Lingkup IPDN; dan
 - c. Kajian Pelaksanaan Smart Campus.

▪ **Perencanaan Program dan Anggaran IPDN Tahun 2024**

Tema dan Arah Kebijakan IPDN Tahun 2024

Tahun 2024 adalah tahun ke 5 (lima) pelaksanaan Peraturan Rektor IPDN Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis IPDN Tahun 2020-2024 dengan Tema Rencana Strategis adalah IPDN Sehat. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran IPDN Tahun 2022, serta memperhatikan dan mencermati permasalahan, tantangan dan isu strategis penyelenggaraan pendidikan IPDN kedepan, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan IPDN Tahun 2024 adalah melanjutkan dan mengoptimalkan Reformasi Pendidikan Vokasi IPDN serta Transformasi Digital IPDN Menuju Smart Campus. Melanjutkan dan mengoptimalkan Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi berfokus pada pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi IPDN sebagai Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang terakreditasi unggul mengedepankan kualitas Pendidikan Tinggi (JARLATSUH), Kajian dan Penelitian serta Pengabdian Masyarakat yang ditopang oleh sinergi dan kolaborasi Core dan Supporting System IPDN secara kelembagaan, program dan kegiatan. Beberapa kegiatan Integrasi kurikulum Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan;

1. Sertifikasi kompetensi berbasis prodi bagi praja IPDN;
2. Sinergitas dan Pengembangan Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi penyelenggaraan laboratorium pemerintahan berbasis prodi serta laboratorium bahasa dalam rangka meningkatkan soft skill praja;
4. Penguatan Budaya Literasi Praja dan Civitas Akademika;

5. Modernisasi dan penataan sarana dan prasarana standar minimal penunjang pendidikan;
6. Pengembangan Kapasitas SDM Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan IPDN;
7. Peningkatan hubungan kemitraan strategis IPDN melalui pelaksanaan Kerjasama Pendidikan maupun non Pendidikan baik secara Nasional maupun internasional; dan
8. Proses Penerimaan Calon Praja IPDN yang bersih dan akuntabel.

Melanjutkan dan mengoptimalkan Transformasi Digital IPDN Menuju Smart Campus, dilaksanakan dalam rangka menjawab tantangan dan kebutuhan dunia pendidikan pada masa disrupsi yang terjadi saat ini, beberapa kegiatan yang menjadi prioritas pengembangan Smart Campus antara lain:

1. Penataan Jaringan dan Data Centre di IPDN Kampus Pusat-Daerah;
2. Pengembangan Aplikasi dan Platform penunjang Smart Campus, dengan beberapa program prioritas diantaranya:
 - a. Pengembangan platform e-learning IPDN;
 - b. Pengembangan Digital Library IPDN; dan
 - c. Pengembangan Smart Campus Database IPDN;
3. Pengembangan SDM Pengelola IT IPDN;
4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang IT IPDN Kampus Pusat-Daerah.

Usulan anggaran untuk tahun 2024 sebesar Rp922.069.765.000,00 atau sebesar 33,99% dari pagu indikatif IPDN Tahun 2024 sebesar Rp608.678.255.000,00

Pagu Indikatif IPDN Tahun 2024

Pagu indikatif anggaran IPDN Tahun 2024 sebesar Rp608.678.255.000,00 mengalami kenaikan sebesar 2,68% (yang telah ditetapkan dalam pembahasan RDP Komisi II DPR RI pada tanggal 12 September 2023), bersumber dari Rupiah Murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1

Pagu Indikatif untuk Anggaran Tahun 2024

No	Sumber Anggaran	Pagu Indikatif (Rp)
1.	Rupiah Murni	597.707.713.000
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	10.970.542.000
Total		608.678.255.000

Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Dari anggaran sebesar Rp608.678.255.000,00 didistribusikan berdasarkan jenis belanja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2**Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja**

No	Jenis Belanja	Besar Anggaran (Rp)
1.	Belanja Pegawai	231.189.950.000
2.	Belanja Barang	266.763.033.000
3.	Belanja Non Operasional	99.754.730.000
4.	PNBP	10.970.542.000
Total		608.678.255.000

Distribusi Alokasi Anggaran IPDN Tahun 2024 ke Kampus Daerah Dari anggaran sebesar Rp608.678.255.000,00, didistribusikan ke masing-masing Kampus IPDN dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3**Alokasi Anggaran Berdasarkan Kampus**

No	Kampus	Besar Anggaran (Rp)
1.	Jatinangor & Jakarta	427.873.283.000
2.	Sumatera Barat	24.646.457.000
3.	Kalimantan Barat	30.027.005.000
4.	Sulawesi Selatan	32.855.243.000
5.	Sulawesi Utara	28.896.533.000
6.	Nusa Tenggara Barat	31.494.444.000
7.	Papua	32.885.290.000
Total		608.678.255.000

Terhadap pagu indikatif yang telah ditetapkan masih ada kebutuhan lain yang sangat prioritas dan mendesak serta telah kami usulkan dalam RDP tanggal 12 September 2023 sebesar Rp201.200.076.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Tambahan Anggaran Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Pemenuhan fasilitas dan sarana Praja di wisma (Sarung, Bantal, Seprai, Handuk, Jas Hujan, Selimut, Tas Kuliah) bagi sejumlah 4.292 Praja	3,519,440,000
2	Dukungan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan seminar bidang pemerintahan (6 kali kegiatan)	6,000,000,000
3	Penataan Tata Udara Gedung Tahap II (Lantai 4 dan 5) dan Lanjutan Penyelesaian Jembatan di Perpustakaan IPDN Kampus Jatinangor	6,856,000,000
4	Rehab Wisma, Pengaspalan Jalan Kampus, Pembangunan Posko Manggala, Pembangunan Pagar Kawasan IPDN Kampus Sulawesi Utara	41,279,000,000
5	Pembangunan Pagar Kawasan IPDN Kampus Sulawesi Selatan	1,206,000,000
6	Penataan jaringan fiber optic Tahap II pada IPDN Kampus Jatinangor (Pengembangan Smart Campus IPDN)	16,549,000,000
7	Penataan IT IPDN Kampus Pusat dan Kampus Daerah untuk mendukung Smart Campus	559,714,000
8	Lanjutan Pembangunan IPDN Kampus Kalimantan Barat	18,807,191,000
9	Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan di IPDN Kampus Jatinangor	36,785,000,000
10	Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan di IPDN Kampus Pusat di Kampus Jakarta	6,980,250,000
11	Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan di IPDN Kampus Sumatera Barat dan Rehabilitasi Gedung Auditorium	11,573,409,000
12	Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan serta kesehatan di IPDN Kampus Sulawesi Utara	2,943,450,000

13	Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan di IPDN Kampus Sulawesi Selatan	1,435,509,000
14	Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan di IPDN Kampus Kalimantan Barat dan Kendaraan Dinas	5,932,347,000
15	Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan di IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat	1,145,500,000
16	Pembangunan rumas dinas tipe 45, talud dan saluran air perumahan serta pembangunan kawasan jalan IPDN Kampus Papua	3,358,343,000
17	Penataan Jaringan Fiber Optic dan Perangkat Aktif Data Center dan Perangkat Aktif Gedung Rektorat IPDN Kampus Jatinangor	8,350,204,000
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Meubelair Gedung Perpustakaan IPDN Jatinangor	6,500,000,000
19	Sarana Penunjang Pendidikan Bagi Praja IPDN Kampus Jatinangor berupa tempat tidur, lemari pakaian dan Meja belajar	11,500,796,000
20	Sarana Pendukung Pendidikan di IPDN Kampus SumateraBarat berupa Penggantian Atap Gedung Perpustakaan dan Penambahan Gonjong/Entrance Gedung Admin	1,218,929,000
21	Lanjutan IPDN Kampus Kalimantan Barat yang digunakan untuk melanjutkan pembangunan Perpustakaan dan Posko Manggala	4,700,000,000
22	Rehabilitasi Masjid IPDN Kampus IPDN Sulawesi Selatan	1,500,000,000
23	Pengadaan Prasarana Pendukung IPDN Kampus Papua	2,500,000,000
Jumlah		201,200,082,000

Tabel 2.4**Prioritas Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2024**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Pemenuhan fasilitas dan sarana Praja di wisma (Sarung, Bantal, Seprai, Handuk, Jas Hujan, Selimut, Tas Kuliah) bagi sejumlah 4.292 Praja	3,519,440,000
2	Penataan Tata Udara Gedung Tahap II (Lantai 4 dan 5) dan Lanjutan Penyelesaian Jembatan di Perpustakaan IPDN Kampus Jatinangor	6,856,000,000
3	Rehab Wisma, Pengaspalan Jalan Kampus, Pembangunan Posko Manggala, Pembangunan Pagar Kawasan IPDN Kampus Sulawesi Utara	41,279,000,000
4	Pembangunan Pagar Kawasan IPDN Kampus Sulawesi Selatan	1,206,000,000
5	Lanjutan Pembangunan IPDN Kampus Kalimantan Barat	18,807,191,000
6	Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan di IPDN Kampus Jatinangor	36,785,000,000
7	Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan di IPDN Kampus Pusat di Kampus Jakarta	6,980,250,000
8	Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan serta kesehatan di IPDN Kampus Sulawesi Utara	2,943,450,000
9	Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan di IPDN Kampus Sulawesi Selatan	1,435,509,000
10	Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan di IPDN Kampus Kalimantan Barat dan Kendaraan Dinas	5,932,347,000
11	Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan di IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat	1,145,500,000
12	Pembangunan rumas dinas tipe 45, talud dan saluran air perumahan serta pembangunan kawasan jalan IPDN Kampus Papua	3,358,343,000
13	Penataan Jaringan Fiber Optic dan Perangkat Aktif Data Center dan Perangkat Aktif Gedung Rektorat IPDN Kampus Jatinangor	

		8,350,204,000
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Meubelair Gedung Perpustakaan IPDN Jatinangor	6,500,000,000
15	Sarana Penunjang Pendidikan Bagi Praja IPDN Kampus Jatinangor berupa tempat tidur, lemari pakaian dan Meja belajar	11,500,796,000
16	Lanjutan IPDN Kampus Kalimantan Barat yang digunakan untuk melanjutkan pembangunan Perpustakaan dan Posko Manggala	4,331,123,000
17	Rehabilitasi Masjid IPDN Kampus IPDN Sulawesi Selatan	1,500,000,000
18	Pengadaan Prasarana Pendukung IPDN Kampus Papua	2,500,000,000
Jumlah		164,930,153,000

- **Kurikulum yang dijalankan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) selama ini dari proses belajar mengajar, Dosen, mata kuliah, pengasuhan Praja, ekstrakurikuler, Penelitian, Magang Praja dan lain sebagainya sehingga menjadi dasar IPDN menjadi Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang Unggul, Profesional, Berintegritas, dan Berdaya Saing Pada Tahun 2045**

A. Kurikulum Program Vokasi Sarjana Terapan Pemerintahan

Untuk menjawab tantangan dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks, IPDN telah melakukan revisi terhadap kurikulum lama melalui Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 423.5-499 Tahun 2021 tentang Kurikulum Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan Terintegrasi Program Sarjana Terapan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kurikulum ini dibentuk melalui berbagai kajian dan masukan dari pengguna (stakeholder) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selaku user dan alumni, dengan menggunakan metode seminar, lokakarya, dan pembahasan substansi teknis bersama dengan pakar, serta melakukan konsolidasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud dan Ristek pada April 2021. Kurikulum IPDN mengadopsi Model *Separated* yang memisahkan SKS Kuliah dengan praktikum yang sifatnya terintegrasi dengan kekhasan IPDN dalam pembentukan sikap dan perilaku melalui Pengasuhan. IPDN juga melakukan adaptasi kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) terutama dalam bentuk :

1. Praktik kerja atau Magang I, Magang II, dan Magang III, yang diikuti oleh Praja Pratama, Praja Muda dan Praja Madya,
2. Membangun Desa/KKN Tematik dalam bentuk Bhakti Karya Praja (BKP) yang diikuti oleh Praja Utama (Tingkat IV);
3. Latihan Integrasi Taruna Wreda (Latsitarda) Nusantara yang diikuti oleh 100 orang Praja

Utama;

4. Penelitian/Riset dengan melibatkan Praja, dan bagi Praja yang mampu menyusun Jurnal Ilmiah Minimal SINTA 2 akan dibebaskan dari kewajiban menyusun Skripsi.

Struktur kurikulum berupa teori sekitar 40%, dan praktikum 60% sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa beban pembelajaran Praja adalah antara 144 SKS sampai dengan 160 SKS dengan distribusi sebagai berikut:

1. Distribusi Mata Pengajaran, Mata Pelatihan dan Mata Pengasuhan Berdasarkan Perbandingan Teori dan Praktikum sebagai berikut:

Tabel 3.1
Distribusi Mata Pengajaran, Mata Pelatihan, dan Mata Pengasuhan
Berdasarkan Perbandingan Teori

No	Fakultas	Prodi	Besaran SKS		Total SKS
			Mata Kuliah	Mata Praktikum	
1.	Manajemen Pemerintahan	1. Keuangan Publik	63	86	149
			42%	58%	100%
		2. Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan	60	88	148
			41%	59%	100%
		3. Administrasi Pemerintahan Daerah	61	85	146
			42%	58%	100%
		4. Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik	60	86	146
			41%	59%	100%
2.	Politik Pemerintahan	1. Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	63	85	148
			43%	57%	100%
		2. Politik Indonesia Terapan	67	82	149
			45%	55%	100%
		3. Studi Kebijakan Publik	59	90	149
			40%	60%	100%
		1. Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	64	85	149
			43%	57%	100%
		Manajemen Keamanan dan	71	77	148

3.	Perlindungan Masyarakat	2.	Keselamatan Publik	48%	52%	100%
		3.	Praktik Perpolisian Tata Pamong	72	78	150
			48%	52%	100%	
RATA-RATA				43%	57%	100%

2. Distribusi Mata Pengajaran, Mata Pelatihan dan Mata Pengasuhan Berdasarkan Perbandingan Sebaran Institut, Inti/Penunjang dan Inti/Prodi sebagai berikut:

Tabel 3.2
Distribusi Mata Pengajaran, Mata Pelatihan, dan Mata Pengasuhan
Berdasarkan Sebaran Institut, Inti/Penunjang dan Inti/Prodi

No	Fakultas	Prodi	Sebaran Mata Kuliah dan Praktikum							Jumlah	%
			Ins-titut	%	Inti/ Penunjang	%	Inti/ Prodi	%			
1.	Manajemen Pemerintahan	1. Keuangan Publik	18	24%	33	45%	23	31%	74	100%	
		2. Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan	19	26%	27	38%	26	36%	72	100%	
		3. Administrasi Pemerintahan Daerah	18	25%	30	42%	24	33%	72	100%	
		4. Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik	17	24%	33	46%	21	30%	71	100%	
2.	Politik Pemerintahan	1. Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	29	41%	22	31%	20	28%	71	100%	
		2. Politik Indonesia Terapan	26	35%	24	32%	24	32%	74	100%	
		3. Studi Kebijakan Publik	25	34%	23	32%	25	34%	73	100%	
		1. Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21	30%	13	18%	37	52%	71	100%	

3.	Perlindungan Masyarakat	2.	Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik	6	8%	13	17%	57	75%	76	100%
		3.	Praktik Perpolisian Tata Pamong	18	25%	19	26%	35	49%	72	100%
RATA - RATA				20	27%	24	33%	29	40%	73	100%

Kegiatan pengajaran dilaksanakan oleh Tenaga pendidik yang terdiri dari Dosen, Pelatih, dan Pengasuh. Dosen bertugas memberikan kuliah, menyampaikan ilmu pengetahuan dan teori sesuai dengan kebutuhan kurikulum pengajaran, Pelatih bertugas memberikan materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan kurikulum pelatihan, dan Pengasuh bertugas menanamkan nilai-nilai Kepamongprajaan sesuai dengan kebutuhan Kurikulum Pengasuhan.

Tenaga pendidik (Dosen/Pelatih) IPDN yang melaksanakan tugas pengajaran/pelatihan saat ini berjumlah 293 orang, terbagi ke dalam 3 (tiga) Fakultas, 1 (satu) Sekolah Pascasarjana, dan 1 (satu) Program Profesi Kepamongprajaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sebaran Dosen Pada Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan Program
Profesi Kepamongprajaan

No	Unit Kerja	Tenaga Fungsional				Jumlah
		Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor	Asisten Ahli	
1.	Fakultas Politik Pemerintahan	3	15	45	14	77
2.	Fakultas Manajemen Pemerintahan	5	12	79	23	119
3.	Fakultas Perlindungan Masyarakat	3	9	43	17	72
4.	Sekolah Pascasarjana	8	10	1	0	19
5.	Profesi Kepamongprajaan	1	3	2	0	6
Total		20	49	170	54	293

Tenaga pendidik (Pengasuh) IPDN yang melaksanakan tugas pengasuhan saat ini berjumlah 176 orang, terbagi ke dalam 2 (dua) Kampus Pusat dan 6 (enam) Kampus Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Sebaran Pengasuh Per Kampus

No	Kampus	Pengasuh		
		L	P	Jumlah
1.	Jatinangor	59	29	88
2.	Jakarta	6	4	10
3.	Sumatera Barat	8	4	12
4.	Kalimantan Barat	8	6	14
5.	Sulawesi Utara	8	4	12
6.	Sulawesi Selatan	8	4	12
7.	Nusa Tenggara Barat	10	8	18
8.	Papua	7	3	10
Jumlah		114	62	176

B. Kurikulum Program Studi Magister Terapan Studi Pemerintahan

Kurikulum Program Studi Magister Terapan Studi Pemerintahan berdasarkan atas Peraturan Rektor IPDN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kurikulum Program Studi Magister Terapan Studi Pemerintahan (S-2) Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dengan jumlah SKS sebanyak 40 (empat puluh) SKS dengan masa studi paling lama 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun. Kurikulum Program Studi Magister Terapan Studi Pemerintahan terdiri dari: mata kuliah matrikulasi, mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Adapun sebaran mata kuliah Program Studi Magister Terapan Studi Pemerintahan pada setiap semester, sebagai berikut:

Semester	Nama Mata Kuliah	SKS
Matrikulasi		
1	Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan	0
2	Revolusi Mental Bagi Aparatur Sipil Negara	0
3	Ketahanan Nasional, Geopolitik dan Geostrategis Indonesia	0
4	Sistem Dinamik	0
5	Statistik Sosial Terapan	0
6	Kapita Selekta Pemerintahan	0
Semester I		
1	Filsafat dan Metodologi Ilmu Pemerintahan	3
2	Metode Riset Sosial Terapan	3
3	Teori dan Terapan Implementasi Kebijakan Pemerintahan	3
4	Teori dan Terapan Pembaharuan Pemerintahan	3
Semester II		
1	Teori dan Terapan Politik Pemerintahan Kontemporer	3
2	Teori dan Terapan Organisasi dan Manajemen Pemerintahan	3
3	Teori dan Terapan Manajemen Pelayanan Publik	3
4	Teori dan Terapan Sosiologi Pemerintahan dan Kearifan Lokal	3
Semester III		
1	Teori dan Terapan Kepemimpinan Pemerintahan dan Kepamongprajaan (Pilihan)*	3
2	Teori dan Terapan Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan (Pilihan)*	3
3	Teori dan Terapan Manajemen SDM Sektor Publik (Pilihan)*	3
4	Teori dan Terapan Analisis Keuangan Negara Dan Daerah (Pilihan)*	3
5	Teori dan Terapan Manajemen Logistik Pemerintahan (Pilihan)*	3
6	Teori dan Terapan Manajemen Strategis dan Perencanaan Pembangunan (Pilihan)*	3
7	Seminar Usulan Penelitian	1
Semester IV		
1	Seminar Hasil Penelitian	0
2	Ujian Tesis	6
JUMLAH SKS		40

C. Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan

Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan berdasarkan atas Peraturan Rektor IPDN Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan (S-3) Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dengan jumlah SKS sebanyak 58 (lima puluh delapan) SKS dengan masa studi paling lama 10 (sepuluh) semester atau 5 (lima) tahun. Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan terdiri dari: mata kuliah matrikulasi dan mata kuliah wajib. Adapun sebaran mata kuliah Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan pada setiap semester, sebagai berikut:

No	MATA KULIAH	SKS
Matrikulasi		
1	Filsafat Pemerintahan	0
2	Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan	0
3	Teori Pembaruan Pemerintahan	0
4	Geopolitik dan Geostrategi Indonesia	0
5	Teori Ilmu Sosial	0
6	Statistika Sosial	0
7	Reformasi Birokrasi	0
Semester I		
1	Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan	3
2	Hukum Tata Pemerintahan	3
3	Kepemimpinan Pemerintahan	3
4	Sosiologi Pemerintahan	3
5	Komunikasi Pemerintahan	3
6	Etika Pemerintahan	3
Semester II		
1	Teori Sumber Daya Manusia Sektor Publik	3
2	Teori Keuangan Negara	3
3	Teori dan Isu-Isu Pembangunan	3
4	Teori Kebijakan Publik	3
5	Teori Pelayanan Pemerintahan	3
6	Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah	3
Semester III		
1	Ujian Prakualifikasi	1
2	Ujian Kualifikasi Doktor	2
3	Ujian Usulan Penelitian	1
4	Ujian Hasil Penelitian	3
5	Ujian Sidang Naskah Disertasi (Tertutup)	8
6	Ujian Sidang Terbuka/Promosi Doktor	7
JUMLAH SKS		58

D. Kurikulum Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan

Kurikulum Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan berdasarkan atas Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.2 – 307 Tahun 2023 Tentang Kurikulum Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan Angkatan XII Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dengan jumlah SKS sebanyak 29 (dua puluh sembilan) SKS dengan masa studi paling lama 2 (dua) Trimester atau 1 (satu) tahun dan dapat dilaksanakan dengan pola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Adapun sebaran mata kuliah Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan pada setiap Trimester, sebagai berikut:

NO	MATA KULIAH	SKS	KLASIFIKASI
Trimester I			
1	Teknik Kepemimpinan Kepamongprajaan	3	Praktik
2	Teknik Administrasi Pertanahan	2	Praktik
3	Teknik Manajemen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	2	Praktik
4	Teknik Administrasi Pemerintahan Daerah	2	Praktik
5	Teknik Analisis Potensi Wilayah dan Perumusan Kebijakan Pemerintahan	2	Praktik
6	Teknik Perencanaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan	2	Praktik
7	Teknik Pelayanan Publik Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal	2	Praktik
8	Teknik Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2	Praktik
9	Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah	2	Praktik
10	Teknik Penulisan Laporan Praktik	2	Praktik
Trimester II			
1	Praktik Lapangan/Magang	2	Praktik
2	Laporan Praktik Lapangan/Magang	4	Praktik
JUMLAH SKS		29	

- **Profil Praja IPDN dalam 3 (tiga) tahun terakhir, terkait dengan jumlah penerimaan dan lulusan praja IPDN, dan tren penerimaan dan lulusan praja**

No	Profil Praja	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Jumlah yang di terima	1.120	1.227	533
2	Berdasarkan Jenis Kelamin			
	- Laki-Laki	723	743	362
	- Perempuan	397	484	171
3	Jumlah Total Praja			
	- Tingkat 1 (Praja Pratama)	1.121	1.228	537
	- Tingkat 2 (Praja Muda)	1.105	1.120	1.226
	- Tingkat 3 (Praja Madya)	1.629	1.097	1.122
	- Tingkat 4 (Praja Utama)	1.994	1.628	1.089
4	Jumlah Lulusan	1.529	1.992	1.627
5	Jumlah Tidak Lulus	10	13	5

- **Prosedur dan proses seleksi penerimaan dan seleksi calon praja IPDN dari proses awal hingga akhir, serta parameter dan kriteria yang digunakan untuk menentukan seorang peserta calon Praja diterima dan lulus menjadi praja IPDN**

Dalam pelaksanaan SPCP IPDN seluruhnya menggunakan pendaftaran secara online dan seleksi yang hasilnya bisa diakses pada hari itu juga oleh peserta, dengan sistem gugur setiap tahapan seleksi. Pendekatan dalam pelaksanaan SPCP IPDN adalah dengan menggunakan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis). Berikut adalah Prosedur dan proses tersebut, selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran.

- Seleksi Administrasi (Online)
Dilakukan secara terpusat melalui portal BKN atau laman <https://dikdin.bkn.go.id/> dimana peserta akan diarahkan untuk memilih salah satu sekolah kedinasan dan melengkapi data pribadi setelah itu peserta wajib mengupload data atau dokumen sesuai persyaratan sekolah kedinasan dimaksud.
- Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan sistem CAT (Compter Asisted Test) oleh BKN, yang dilakukan sesuai standar dan prosedur seleksi yang telah ditetapkan oleh BKN.
- Tes Kesehatan Tahap 1 dilaksanakan bekerja sama dengan Pusdokkes Mabes Polri yang dilaksanakan oleh Bidokkes di 34 Polda.
- Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran dilaksanakan bekerja sama dengan Pusat Psikologi Mabes Polri yang dilaksanakan oleh Biro SDM di 34 Polda.
- Tes Kesehatan Tahap 2 dilaksanakan bekerja sama dengan Pusdokkes Mabes Polri yang dilaksanakan oleh Bidokkes di 34 Polda.
- Verifikasi Faktual Dokumen Administrasi Pendaftaran (langsung di tempat tes)
Dilaksanakan pada masing-masing lokasi tes yang telah ditentukan dan diverifikasi oleh panitia dari IPDN untuk mengecek keaslian dokumen pada saat pendaftaran online.
- Tes Kesamaptan dan Pemeriksaan Penampilan dilaksanakan bekerja sama dengan Biro Wadpres Mabes Polri yang dilaksanakan oleh Biro SDM di 34 Polda.

- **Rektorat IPDN membenahi permasalahan rekrutmen dan seleksi Praja IPDN yang masih dianggap kurang transparan**

Pelaksanaan SPCP IPDN sejak tahun 2020 telah dilaksanakan secara bersih transparan akuntabel dan humanis dimana masing-masing peserta di dalam mengikuti tahapan seleksi langsung mendapatkan hasil tes dan seluruh proses diketahui oleh publik, baik dalam tahap pelaksanaan SKD oleh BKN, maupun Tes Kesehatan Tahap 1, tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran, Tes Kesehatan Tahap 2, serta Tes Kesempatan dan Pemeriksaan Penampilan. Sejak tahun 2020 sudah tidak ada lagi komplain/pengaduan dari masyarakat

- **Rektorat IPDN menetapkan kuota jumlah calon praja IPDN secara keseluruhan dari tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pemenuhan anggaran yang akan dipersiapkan oleh Rektorat IPDN**

1. Untuk kebutuhan calon praja IPDN didasarkan atas kebutuhan ASN yang diusulkan Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Kementerian/Lembaga yang diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Biro Kepegawaian Setjen Kemendagri dengan mendasarkan pada Permendagri Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Penentuan Kebutuhan Calon Praja IPDN, yang di koordinasikan dengan KemenPAN-RB untuk ditetapkan formasinya.
2. Untuk sementara sampai dengan saat ini perencanaan anggaran didasarkan atas Baseline tahun anggaran berjalan, karena pada saat pengusulan anggaran formasi dari Kemen PAN-RB belum ditetapkan (formasi kebutuhan calon praja IPDN baru ditetapkan pada akhir Maret menjelang pelaksanaan seleksi pada bulan April)

- **Permasalahan pengurangan Kuota penerimaan Praja IPDN oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), Sikap Rektorat dan Rencana Rektorat IPDN dalam penerimaan Praja IPDN**

Dengan terbitnya surat Menpan-RB nomor B/675/M.SM.01.00/2023 tanggal 29 Maret 2023 Perihal Persetujuan Prinsip Kebutuhan Praja Sekolah Kedinasan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun Anggaran 2023 untuk mengisi Kebutuhan CPNS di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Bapak Menteri Dalam Negeri telah meminta kepada Menpan-RB untuk mempertimbangkan alokasi formasi kebutuhan calon praja IPDN dengan mendasarkan pada hasil validasi antara Kementerian PAN-RB dengan Kementerian Dalam Negeri sejumlah 1.410 formasi yang dialokasikan untuk Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, namun tidak dapat dipenuhi.

Selanjutnya ada ide gagasan baru untuk melakukan program pendidikan profesi kepamongprajaan bagi ASN yang tidak berlatar belakang ilmu pemerintahan dengan didasarkan pada surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menpan-RB, Mendikbudristek, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara LAN. Namun saat ini belum dapat direalisasikan karena surat masih tertahan di Kemendikbudristek.

Untuk kebutuhan praja IPDN kedepan, IPDN dan Biro Kepegawaian Setjen Kemendagri telah merencanakan usulan kepada MenPAN-RB sebanyak 1.410 formasi calon praja. untuk itu mohon dukungan Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

- **Kendala Kelembagaan IPDN secara Kelembagaan, Alokasi Anggaran, serta Masalah Regulasi**

Untuk kelembagaan IPDN harus tetap dipertahankan dan dikembangkan karena IPDN adalah sebagai lembaga pendidikan tinggi kepomongprajaan yang mencetak kader penyelenggara pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan daerah guna percepat pelayanan prima kepada masyarakat dan sebagai perekat NKRI. Alumni praja IPDN disamping dibekali oleh ilmu pemerintahan, juga dididik dan dikembangkan karakternya dengan mendasarkan delapan nilai asta brata, yaitu:

1. berjiwa Pancasila
2. unggul, profesional dan berintegritas
3. menguasai IPTEK dan berdaya saing
4. kader revolusi mental dan agen perubahan
5. mengayomi, melayani dan melindungi masyarakat
6. perekat persatuan dan kesatuan NKRI
7. berwawasan nasional dan global
8. adaptif, inovatif, produktif dan kompetitif

sehingga alumni IPDN lebih siap untuk melaksanakan tugas dalam pengabdian sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Selanjutnya untuk kebutuhan anggaran hendaknya alokasi anggaran yang ditetapkan dapat memenuhi kebutuhan prioritas IPDN, khususnya dalam mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dan pembiayaan kegiatan Tridharma perguruan tinggi (kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat).

Disamping itu perlu juga diketahui bahwa alokasi anggaran pemeliharaan tidak sebanding dengan aset yang dimiliki IPDN terdiri atas 8 kampus. Khusus untuk IPDN Kampus Jatinangor dan Jakarta usia aset yang saat ini sudah melebihi 30 tahun, sehingga banyak memerlukan renovasi baik gedung maupun prasarana lainnya.

- **Sikap dan Keputusan Rektorat IPDN terhadap kejadian kekerasan kepada Praja IPDN yang melaksanakan Magang di Pemerintahan Provinsi Lampung, serta regulasi terhadap antisipasi mengulangnya kasus-kasus kekerasan yang pernah terjadi terhadap Praja IPDN di dalam Kampus maupun dalam kegiatan pengasuhan**

Masalah kejadian di Pemerintah Provinsi Lampung dimana purna praja yang dipukuli oleh alumni adalah merupakan kewenangan Biro Kepegawaian Setjen Kemendagri karena purna praja yang dipukuli sudah berstatus sebagai pamong praja muda/CPNS Setjen Kemendagri yang telah dilantik oleh Bapak Wakil Presiden RI pada tanggal 27 Juli 2023 dan diserahkan oleh IPDN kepada Sekjen Kemendagri tanggal 6 Agustus 2023, dengan demikian masalah tersebut, bukan menjadi tanggung jawab IPDN.

- **Aturan penempatan lulusan Praja IPDN di Lembaga/Kementerian, Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta kriteria khusus yang digunakan dalam hal penempatan lulusan IPDN**

Penempatan lulusan IPDN oleh Biro Kepegawaian Setjen Kemendagri didasarkan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Penempatan Tugas Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Penempatan lulusan praja IPDN merupakan kewenangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan berpedoman pada Permendagri nomor 34 tahun 2019 tentang Penempatan Tugas Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Adapun kriteria dalam alokasi penempatan lulusan praja IPDN di Lembaga/Kementerian, Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah ditetapkan dengan alokasi:

1. 85% - 100% ditempatkan daerah asal/Instansi daerah dan daerah perbatasan; dan
2. 0% - 15% ditempatkan pada instansi pusat

V. KESIMPULAN

Dalam hal pengurangan Kuota Penerimaan Calon Praja IPDN, setelah melihat laporan realisasi program dan anggaran Tahun 2023, Anggaran Tambahan Tahun 2023, dan Penyerapannya, Perencanaan Program dan Anggaran IPDN Tahun 2024, kurikulum, Prosedur dan proses seleksi penerimaan dan seleksi calon praja IPDN dari proses awal hingga akhir serta upaya membenahi permasalahan rekrutmen dan seleksi Praja IPDN yang masih dianggap kurang transparan, bahwa pelaksanaan SPCP IPDN sejak tahun 2020 telah dilaksanakan secara bersih transparan akuntabel dan humanis.

Masing-masing peserta di dalam mengikuti tahapan seleksi langsung mendapatkan hasil tes dan seluruh proses diketahui oleh publik, baik dalam tahap pelaksanaan SKD oleh BKN, maupun Tes Kesehatan Tahap 1, tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran, Tes Kesehatan Tahap 2, serta Tes Kemampuan dan Pemeriksaan Penampilan. Sejak tahun 2020 sudah tidak ada lagi komplain/pengaduan dari masyarakat.

Terkait kebutuhan calon praja IPDN didasarkan atas kebutuhan ASN yang diusulkan Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Kementerian/Lembaga yang diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Biro Kepegawaian Setjen Kemendagri dengan mendasarkan pada Permendagri Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Penentuan Kebutuhan Calon Praja IPDN, yang di koordinasikan dengan KemenPAN-RB untuk ditetapkan formasinya. Sampai dengan saat ini perencanaan anggaran didasarkan atas Baseline tahun anggaran berjalan, formasi kebutuhan calon praja IPDN baru ditetapkan pada akhir Maret menjelang pelaksanaan seleksi pada bulan April.

VI. REKOMENDASI

Terkait permintaan Menteri Dalam Negeri telah kepada Menpan-RB untuk mempertimbangkan alokasi formasi kebutuhan calon praja IPDN dengan mendasarkan pada hasil validasi antara Kementerian PAN-RB dengan Kementerian Dalam Negeri sejumlah 1.410 formasi yang dialokasikan untuk Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota akan segera ditindaklanjuti dalam rapat dengar pendapat dengan kementerian terkait.

VII. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke IPDN Jatinangor Provinsi Jawa Barat terkait evaluasi penerimaan Praja IPDN masa persidangan I Tahun Sidang 2023-2024, Tanggal 21 September 2023 disusun, disampaikan, dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih.

Jakarta, 26 September 2023

KETUA KOMISI II DPR RI

Dr. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.

NO. A-270